

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uang memiliki fungsi yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Layaknya fungsi uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi, uang tidak terlepas dari proses transaksi ekonomi di setiap negara. Uang juga dapat dikatakan sebagai indikator penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yakni, produksi, distribusi dan konsumsi berkaitan erat dengan uang. Pemerintah dalam hal ini bank sentral selaku otoritas moneter, seringkali menggunakan instrumen uang dalam melaksanakan kebijakannya dalam bidang ekonomi, khususnya bidang keuangan dan perbankan. Bank Indonesia selaku Bank Sentral memiliki tiga pilar tugas utama yaitu 1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 2) mengatur dan menjaga sistem pembayaran; 3) mengatur dan mengawasi bank.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatur dan menjaga sistem pembayaran Bank Indonesia memiliki tugas khusus yaitu mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia yang meliputi kegiatan mencetak mengedarkan serta mengatur jumlah uang beredar. Bank Indonesia menyadari bahwa sistem pembayaran berperan penting untuk memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha.

Terselenggaranya sistem pembayaran sebagai infrastruktur sistem keuangan merupakan faktor penting untuk mendukung stabilitas keuangan dan moneter. Terdapat tiga jenis besaran moneter di Indonesia, yaitu *base money* (M0), *narrow money* (M1), dan *broad money* (M2). Kemajuan yang cepat dalam teknologi mengubah kondisi sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi.

Transaksi ekonomi sekarang ini tidak hanya difasilitasi dengan uang tunai saja tapi telah merambah dengan menggunakan instrumen non tunai secara elektronik yang lebih efisien dan

ekonomis. sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi seperti, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) sepertiii kartu kredit, kartu debit, kartu ATM,SKNBI, sistem BI-RTGS dan terakhir mulai muncul *e-money*.

Kartu elektronik ini dibuat dengan tujuan untuk kemudahan masyarakat dalam bertransaksi. Jika dulu sebelum munculnya sistem pembayaran elektronik, maka ketika bertransaksipun kita harus bertemu dengan pihak yang kita ajak untuk bertransaksi, setelah kemunculan *electronic payment sistem* ini kita mampu menghemat biaya, maupun mendapatkan kepraktisan dan kemudahan dalam bertransaksi.

Dalam hal ini perbankan berlomba-lomba dalam berinovasi dalam sistem pembayaran elektronik, yaitu diantaranya kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, *smart card*, *e money* dll. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/30/PBI/2004 kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit atau *acquirer*, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus ataupun secara angsuran.

Kartu ATM dan kartu debit memiliki definisi yang hampir sama yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang mendapat untuk menghimpun dana.

Peran sistem pembayaran non tunai akan semakin besar dan vital bagi perkembangan perekonomian suatu negara khususnya dengan semakin dominannya peran sistem pembayaran bernilai besar dibandingkan sistem pembayaran bernilai kecil. Keamanan dan

efisiensi sistem ini tidak hanya mendukung pihak yang dilayaninya secara langsung, tetapi juga sistem keuangan nasional secara keseluruhan.

Masa kejayaan monopoli bank sentral dalam mengendalikan perekonomian melalui penerbitan uang dalam bentuk *fiat money* atau uang kepercayaan secara bertahap akan berkurang sejalan dengan perkembangan alat pembayaran non tunai (*electronic money*).

Perkembangan teknologi informasi akan memberi implikasi pada berkurangnya peran *base money* dalam transaksi pembayaran. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, perkembangan ini akan menyebabkan bank sentral di masa depan hanya mampu memberikan signal kondisi moneter tanpa memiliki kemampuan untuk menciptakan kestabilan moneter.

Pemikiran ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa pembayaran non tunai dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik transfer melalui pasar uang yang modern akan mengurangi kebutuhan atau permintaan akan perlunya memelihara sejumlah likuiditas (*reserves balances*) pada bank sentral (sebagai salah satu komponen dari *base money*). Sementara perkembangan alat pembayaran menggunakan kartu, khususnya *e-money* dapat menurunkan kebutuhan atau permintaan akan uang kartal.

Perkembangan non tunai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, selain didukung oleh kemajuan teknologi adanya perubahan pola hidup masyarakat dan berkembangnya inovasi menambah macam transaksi non tunai. Di jaman modern seperti saat ini, kepraktisan merupakan hal yang sangat penting.

Untuk kebutuhan keuangan kini banyak sekali teknologi yang dapat digunakan misalnya berkembangnya *e-money*. *E-money* memudahkan dan mendukung kebutuhan aktivitas manusia dalam banyak hal misalnya membayar tol, transaksi umum seperti membeli pulsa dan berbelanja. Berbeda dengan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit yang terhubung langsung ke rekening pengguna, transaksi melalui *e-money* tidak terhubung dengan rekening pengguna melainkan memiliki kantong sendiri yang dapat diisi ulang dengan cara *top-up*. Peredaran uang dapat mempengaruhi inflasi ketika kecepatan perputaran uang tinggi.

Kecepatan perputaran uang adalah salah satu variabel yang menentukan inflasi. teori kuantitas uang yang dikemukakan Irving Fisher menyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh jumlah uang, dengan asumsi kecepatan perputaran uang dan volume barang yang diperdagangkan tetap. Teori tersebut dibantah oleh Keynes. Keynes mengungkapkan bahwa jumlah uang bukan satusatunya penyebab inflasi. Menurut teori ini inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya.

Tingkat inflasi sangat dipengaruhi oleh jumlah uang beredar di Indonesia. Oleh sebab itu, jika tingkat inflasi meningkat, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat pun ikut bertambah. Sebaliknya jika jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang, maka tingkat inflasi pun ikut menurun.

Tabel 1.1 Jumlah Uang Beredar di Indonesia

Tahun	Jumlah Uang Beredar M1 (dalam Milyar)	Persentase (%)
2010	605.410,53	5,65
2011	722.991,17	6,75
2012	841.721,49	7,86
2013	878.081,01	8,29
2014	942.221,34	8,80
2015	1.005.439,82	9,86
2016	1.237.642,57	11,56
2017	1.390.806,95	12,99
2018	1.457.149,68	13,61

2019	1.565.358.00	14,62
-------------	---------------------	--------------

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) (Data diolah, 2021)

Dari data diatas Jumlah Uang Beredar semakin bertambah pada tahun 2010 sebesar 605.410,53 milyar dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 1.565.358.00 milyar. Ini membuktikan bahwa uang yang dipegang masyarakat semakin bertambah setiap tahunnya dan akan berdampak terjadinya inflasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yaitu, pengaruh tingkat suku bunga, pengaruh output, dan pengaruh *electronic money* terhadap jumlah uang beredar.

Seiring dengan kemajuan zaman maka berkembang pula sistem teknologi dan informasi didalam masyarakat, hal ini semakin memudahkan manusia dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Perkembangan teknologi dan informasi tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dunia pendidikan saja namun dalam bidang ekonomi pun memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut.

Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus berubah- ubah bentuknya, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga kini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik.

Di Indonesia sendiri, penggunaan uang elektronik (*e-money*) ini dimulai di tahun 2007 tetapi masih diatur dalam pengaturan mengenai APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu). Bank Indonesia mencatat jumlah transaksi di tahun 2010 ada sekitar 26,541,982 transaksi, di tahun 2019 meningkat menjadi 5,226,699,919. Berdasarkan data yang di dapatkan dari situs resmi Bank Indonesia penggunaan *e-money* sebagai alat transaksi terus

mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir ini. Berikut adalah tabel data transaksi menggunakan *e-money* :

Tabel 1.2 Data Transaksi *e-money* (2010-2019)

Tahun	Transaksi e-money	Persentase (%)
2010	26,541,982	0,25
2011	41,060,149	0,38
2012	100,623,916	0,93
2013	137,900,779	1,27
2014	203,369,990	1,88
2015	535,579,528	4,95
2016	683,133,352	6,31
2017	943,319,933	8,72
2018	2,922,698,904	27,01
2019	5,226,699,919	48,30

Sumber : Bank Indonesia (Data diolah, 2021)

Dilihat Dari data di atas terlihat bahwa perkembangan uang elektronik ini begitu cepat dan signifikan. Ini menunjukan bahwa masyarakat mulai beralih menggunakan uang elektronik yang akan berdampak pada rumus jumlah uang beredar saat ini.

Dalam penerbitan *e-money*, *issuer* memiliki sejumlah dana (*monetary value*) yang tercatat dalam media storage-nya yang belum digunakan untuk pembayaran, atau sudah digunakan untuk pembayaran namun belum ditagihkan atau di-*redeem* oleh merchant disebut

float. *Float* ini merupakan kewajiban (*liability*) penerbit atas *e-money* yang diterbitkan. Kewajiban tersebut akan berkurang pada saat pemegang *e-money* melakukan transaksi pembayaran atau di-*redeem* oleh merchant.

Berdasarkan karakteristik *e-money* tersebut, dimana *float* setiap saat dapat digunakan sebagai alat pembayaran, maka jenis dana ini dapat dikategorikan sebagai dana yang sangat likuid sehingga dapat disetarakan dengan uang tunai (*cash*) atau giro. Sehingga untuk mengkomodasi perkembangan *e-money* ke depan dan kemungkinan dampaknya terhadap perumusan besaran moneter, seyogyanya *float e-money* dapat diperhitungkan sebagai bagian dari M1.

Saat ini terlihat terjadi pergeseran definisi *saving deposit*. Penarikan *saving deposit* dapat dilakukan dengan mudah, terlebih dengan berkembangnya fasilitas ATM. Meskipun masih terdapat pembatasan atas maksimal jumlah penarikan dalam satu hari, namun kebebasan penarikannya hampir menyamai *demand deposit*. Oleh karena itu perlu diperhatikan pengklasifikasian tabungan yang menggunakan ATM dan kartu debit sebagai bagian dari M1 dalam kategori uang giral dan bukan lagi bagian dari M2.

Demikian juga halnya dengan *e-money* yang merupakan produk *stored value* yang sifatnya sangat liquid dan dapat disetarakan dengan uang tunai atau giro (setara M1). Pengklasifikasian yang kurang tepat terhadap besaran moneter dapat menimbulkan implikasi kesalahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter yang menggunakan besaran moneter (M1 dan M2) sebagai indikator moneter maupun operasional target.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *e-money* berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar?
2. Apakah inflasi mampu memoderasi pengaruh *e-money* terhadap jumlah uang beredar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *e-money* terhadap jumlah uang beredar
2. Untuk mengetahui kemampuan inflasi dapat memoderasi hubungan antara *e-money* terhadap jumlah uang beredar?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung hasil penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang sama (*e-money*) dan teori mengenai uang.
2. Dapat memberikan pengetahuan atau pandangan baru yang mendukung perkembangan teori mengenai uang atau uang elektronik.
3. Dapat menambah wawasan dan mengetahui apakah benar bahwa terdapat pengaruh antara *e-money* terhadap jumlah uang beredar yang dimoderasi oleh inflasi.